

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) sesuai dengan Perpres No. 9 Tahun 2015, tentang Kemenko PMK bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan pembangunan manusia dan kebudayaan. Urusan ini salah satunya menjangkau program kesejahteraan rakyat, melalui pemberian bantuan sosial pada masyarakat. Bantuan ini diberikan untuk memenuhi dan menjamin kebutuhandasar serta meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Upaya ini juga sejalan dengan amanat dalam Inpres Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif. Pemerintah melalui kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program. Program Bansos (Selanjutnya disebut Bansos) untuk Rakyat mencakup Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Perluasan program bantuan sosial merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan.

Bantuan Sosial banyak mendapat perhatian publik karena memiliki kepentingan yang perlu diakomodir untuk membantu tugas pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 tahun 2011 menyebutkan: “bansos merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif, bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial”. Sebab, bantuan sosial prinsipnya ditujukan kepada masyarakat miskin dan rentan.

Bantuan sosial diklasifikasi menjadi beberapa bentuk, salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT). BLT yang diterima oleh masyarakat berupa uang tunai dan sembako. BLT memiliki beberapa tujuan diantaranya;

1. Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya,
2. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi,
3. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

Tujuan Bantuan Langsung Tunai mengarah pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan ekstrim yang sedang dan akan dialami oleh masyarakat (Sari, 2022).

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)**

| No | Tahun  | Jumlah Penerima (kk) |
|----|--------|----------------------|
| 1. | 2020   | 70                   |
| 2. | 2021   | 67                   |
| 3. | 2022   | 60                   |
| 4. | 2023   | 60                   |
|    | Jumlah | 257                  |

*Sumber : Desa Nauke Kusa (2023)*

Berdasarkan tabel jumlah keluarga penerima Bantuan Langsung Tunai di atas, setiap tahun mengalami peningkatan naik turun. Pada tahun 2020, Jumlah keluarga penerima BLT di Desa Nauke Kusa berjumlah 182 KK. Namun, pada tahun selanjutnya, yaitu tahun 2021 jumlah penerima BLT mengalami sedikit penurunan. Pemerintah menyediakan bantuan secara terbatas dan tidak berdasarkan data tahun sebelumnya. selain itu, hal ini disebabkan karena masyarakat yang membutuhkan BLT berkurang. Selanjutnya, pada tahun 2022 jumlah keluarga penerima BLT mengalami penurunan yang cukup signifikan, kendati angka kemiskinan belum mampu ditekan secara maksimal. Pada tahun tersebut, angka berkurang menjadi 140 kk. Jumlah tersebut tidak mampu dipertahankan secara serius oleh pemerintah. Oleh karena itu, pada tahun 2023 kenaikan jumlah keluarag penerima BLT menjadi sengan tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. jumlah penerima BLT meningkat, pada satu sisi menunjukkan bahwa pemerintah melakukab interfensi peningkatan kesejahteraan semakin lebih merata dan menjangkau banyak keluarga. Namun, pada sisi yang lain, lonjakan angka keluarag penerima BLT mengandaikan bahwa upaya menekan kemiskinan belum maksimal, sehingga masih banyak keluarga yang membutuhkan sentuhan bantuan pemerintah melalui BLT.

Persoalan sebagaimana dijelaskan diatas, terjadi di masyarakat desa Nauke Kusa, Kecamatan Laen Manen, Kabupaten Malaka. Masyarakat pada umumnya merupakan petani lahan kering dan peternak. Karena itu, keadaan ekonomi masyarakat tergolong sangat rendah, meskipun sumber daya alam cukup memadai untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Selain itu, sistem pertanian dan sistem beternak masyarakat desa Nauke Kusa masih sangat konvensional. Hal ini dipengaruhi juga oleh sumber daya manusia

yang tergolong minim karena itu pengetahuan yang luas untuk mengelola sumberdaya dan potensi yang ada menjadi sangat rendah.

Masyoritas masyarakat mendapat hak menerima bantuan sosial seperti PKH dan BLT dari pemerintah. Sesungguhnya dengan intervensi pemerintah seperti ini, masyarakat seharusnya sudah perlahan-lahan mengalami peningkatan ekonomi, usaha-usaha kecil, maupun menengah mulai bertumbuh di masyarakat. Namun, fakta tidak sejalan dengan tujuan bantuan sosial yang dicanangkan oleh pemerintah

Selanjutnya, masyarakat cenderung menunggu bansos untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya sangat konsumtif, karena itu bansos hanya mampu memenuhi kebutuhan jangka pendek dan tidak berdampak pada peningkatan ekonomi, pengembangan usaha dan sebagainya. Hal ini menjadi sangat memprihatinkan dan menunjukkan bahwa pemerintah desa belum membangun sistem peningkatan sumber daya manusia dan tidak memiliki strategi pengembangan ekonomi masyarakat.

Hal ini merupakan kendala dan masalah yang sangat serius. Jika tidak dievaluasi dan tidak menjadi perhatian serius pemerintah desa, maka bansos yang digelontorkan oleh pemerintah pusat melalui kementerian terkait tidak memiliki manfaat jangka panjang untuk meningkatkan ekonomi, sumberdaya masyarakat dan sebagainya. Oleh karena itu, perlu adanya solusi yang terstruktur, baik kepada pemerintah desa, maupun kepada masyarakat setempat.

Penelitian sebelumnya oleh (Herrera VILLANUEVA, 2020) Dampak BLT terhadap kesejahteraan rakyat terlihat pada prioritas masyarakat miskin dimana prioritas penggunaan dana BLT paling utama adalah sembako. Hal ini menunjukkan bahwa BLT belum efisien dalam memenuhi kebutuhan masyarakat miskin karena prioritas utama dari BLT tersebut masih untuk kebutuhan dasar. BLT tersebut memiliki manfaat sangat besar bagi kelangsungan hidup masyarakat miskin terutama dalam pemenuhan kebutuhan. Selain itu, BLT tidak terpengaruh terhadap kinerja masyarakat miskin karena masyarakat miskin tidak bisa hidup jika hanya menggantungkan penerimaannya pada BLT. Di satu sisi, kebijakan BLT ini mungkin akan memberikan dampak positif bagi masyarakat miskin. Dengan BLT, kenaikan biaya hidup yang diakibatkan oleh kenaikan BBM secara langsung maupun dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat kenaikan BBM, akan sedikit tertutupi dengan adanya dana yang diberikan oleh pemerintah. Namun, BLT sesungguhnya harus berdampak lebih luas untuk peningkatan usaha dan pendapatan bagi masyarakat.

Selanjutnya, menurut (Rahmadi, 2022) pada dasarnya BLT dapat membantu masyarakat miskin. Namun program ini tidak dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin, apalagi mengurangi angka kemiskinan. Karena program ini adalah program jangka pendek dan sifatnya sementara. Program ini hanya dijalankan pada keadaan tertentu saja yaitu pada saat terjadi krisis ekonomi dunia yang berimbas pada perekonomian

nasional. Program ini dapat dikatakan juga program yang bersifat insidental, artinya pada saat terjadi krisis baru program ini dijalankan.

Berdasarkan kajian dari penelitian yang dilakukan oleh (HERRERA VILLANUEVA, 2020) menegaskan bahwa BLT tidak memiliki dampak signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Bahkan, masyarakat tidak dapat menggunakan BLT untuk membangun usaha lebih lanjut. Karena BLT, merupakan bantuan pemerintah bagi masyarakat miskin hanya bersifat insidental dan hanya dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek.

Penelitian terdahulu diatas memberi kesimpulan bahwa BLT yang dibagikan oleh pemerintah memiliki dampak yang sangat terbatas. Dampak sosial-ekonomi dari BLT tidak didalami lebih jauh oleh Selvyana dan Hardiwidansyah. Oleh karena itu, kajian dengan judul “Analisis Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Sosial-Ekonomi masyarakat penerima” bertujuan untuk mengkaji dampak Sosial-Ekonomi terhadap Masyarakat Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Nauke Kusa, Kecamatan Laen Manen, Kabupaten Malaka. Selanjutnya, penulis hendak memberikan solusi alternatif pengelolaan bansos oleh pemerintah Desa agar dapat memberi dampak sosial yang signifikan dan sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa Nauke Kusa.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apakah pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Desa Nauke Kusa sesuai dengan Permendes?
2. Apa faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan BLT DD di desa Nauke Kusa?
3. Bagaimana Dampak BLT DD terhadap Sosial Ekonomi Keluarga Penerima di Desa Nauke Kusa?

### **1.3. Tujuan**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Desa Nauke Kusa sesuai dengan Permendes
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan BLT DD di desa Nauke Kusa
3. Untuk mengetahui Dampak BLT DD terhadap Sosial Ekonomi Keluarga Penerima di Desa Nauke Kusa

### **1.4. Manfaat**

Berhubungan dengan tujuan penelitian diatas, maka peneliti memaparkan beberapa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara akademis, dapat memberikan sumbangan positif terhadap penambahan wawasan.

2. Secara teoritis, dapat menambah pengetahuan serta mengasah kemampuan penulis dalam penulisan karya ilmiah.
3. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pihak-pihak yang terlibat dalam program bantuan sosial (bansos).